

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor bagi penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah, memuat bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas.

Untuk mewujudkan pengelolaan yang fleksibel maka dibentuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang merupakan konsep baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Konsep ini mengadopsi model agensifikasi yang berkembang di Inggris yang dikenal dengan *New Public Management*.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang dimaksud Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Salah satu tujuan pemerintahan membentuk Badan Layanan Umum adalah agar instansi pemerintahan tersebut fleksibel dalam mengelola keuangannya. Salah satu instansi pemerintahan yang dibentuk menjadi BLU adalah perguruan tinggi. Fleksibilitas yang diberikan kepada perguruan tinggi yang sudah BLU adalah fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya yaitu pengelolaan keuangan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal (2) BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam

pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Menurut Waluyo (2011) fleksibilitas yang dimiliki pola pengelolaan keuangan yaitu pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengadaan barang dan jasa, akuntansi, remunerasi, surplus/defisit, dan status kepegawaian.

Suatu instansi dalam penerapan PPK-BLU, tidak hanya fokus pada peningkatan pengelolaan keuangan tetapi juga peningkatan pelayanan terhadap *stakeholdernya*. Peningkatan pelayanan dapat dinilai dari indeks kepuasan masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih produktif. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Karena seharusnya semakin fleksibel dalam pengelolaan keuangan maka semakin baik pula dalam memberikan pelayanan publik. Karena tujuan PPK-BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penilaian kinerja terhadap perguruan tinggi yang menerapkan PPK-BLU perlu dilakukan dengan melihat indikator keuangan dan non keuangan. Penilaian kinerja keuangan dilakukan guna melihat bagaimana instansi tersebut dalam hal pengelolaan keuangannya, sedangkan penilaian kinerja non keuangan perlu dilakukan guna melihat kinerja manajemen mengenai pengelolaan instansi tersebut dalam pelayanan yang efisien dan produktif demi tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan.

Pedoman penilaian kinerja Badan Layanan Umum di bidang layanan pendidikan telah diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 32/ PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan

Umum di bidang layanan pendidikan. Penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja Badan Layanan Umum berdasarkan analisis data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Penilaian aspek pelayanan adalah penilaian kinerja Badan Layanan Umum terkait teknis dan mutu manfaat kepada masyarakat.

Universitas Negeri Padang (UNP) menjadi Instansi Pemerintah dengan status PPK-BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KMK.05/2015, maka status Universitas Negeri Padang telah sah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sehingga dapat menerapkan fleksibilitas di dalam pengelolaan keuangan dan mengembangkan aset serta layanannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Sebagai instansi yang tergolong baru dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), maka perlu diteliti bagaimana kinerja Universitas Negeri Padang setelah diberlakukannya PPK-BLU tersebut, apakah kinerjanya sudah mengalami peningkatan setelah diterapkannya PPK-BLU. Melihat dari jumlah keseluruhan mahasiswa UNP yang tergolong banyak yaitu lebih dari 30.000 orang dan pencapaian akreditasi A, tentu UNP dituntut untuk menunjukkan kinerja yang baik tidak hanya dilihat dari aspek keuangannya saja tetapi juga aspek non keuangan. Karena Universitas bukanlah perusahaan yang mencari laba.

Penelitian terdahulu mengenai kinerja Universitas berstatus PPK-BLU dilakukan oleh Maharani (2013) yang meneliti tentang Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Sebelas Maret. Hasilnya ialah rasio pendapatan terhadap belanja setelah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengalami peningkatan dari sebelum penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Ermitati (2016) meneliti tentang Analisis Kinerja Universitas Berstatus Badan Layanan Umum (BLU) (Studi Kasus Pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

Dimana menilai kinerja berdasarkan *balance scorecard*, dengan hasil Kinerja untuk perspektif pemangku kepentingan, perspektif pendidikan dan pembelajaran, serta perspektif SDM dan budaya belum mampu mencapai apa yang diharapkan. Sedangkan untuk perspektif administrasi dan keuangan sudah mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan yang tertuang dalam renstra 2008-2012.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “**Analisis Kinerja Universitas Negeri Padang setelah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum**”. Karena BLU pada dasarnya adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, maka kinerja keuangan dan pelayanan instansi juga produktif atau meningkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Universitas Negeri Padang setelah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum”, dengan perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana capaian kinerja keuangan Universitas Negeri Padang sebelum diterapkannya PPK-BLU (tahun 2014 s.d 2015)?
- b. Bagaimana capaian kinerja keuangan Universitas Negeri Padang setelah diterapkan PPK-BLU (tahun 2016)?
- c. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat (mahasiswa) terhadap Universitas Negeri Padang setelah diterapkannya PPK-BLU?
- d. Bagaimana hasil pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan Universitas Negeri Padang setelah diterapkan PPK-BLU dengan indikator kinerja berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : Per-32 /PB/2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui bagaimana kinerja keuangan Universitas Negeri Padang sebelum diterapkannya PPK-BLU (tahun 2014 s.d 2015)
- b. Mengetahui dan mengevaluasi bagaimana kinerja keuangan Universitas Negeri Padang setelah diterapkan PPK-BLU (tahun 2016).
- c. Mengetahui dan mengevaluasi bagaimana tingkat kepuasan masyarakat (mahasiswa) terhadap Universitas Negeri Padang setelah diterapkannya PPK-BLU.
- d. mengevaluasi dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan dan non keuangan Universitas Negeri Padang setelah diterapkan PPK-BLU (tahun 2016) dengan indikator berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : Per-32 /PB/2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis dan pihak lain yang berkepentingan, dengan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pihak lain yang berkepentingan.
- b. Bagi instansi yang diteliti, memberikan masukan guna perbaikan kinerja instansi kedepannya.
- c. Bagi praktisi dan akademisi, sebagai referensi dan tambahan informasi.